

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**Oleh
MELLI PERMATA**

Kejaksaan adalah salah satu instansi penegak hukum yang memiliki kompetensi dan wewenang yang diatur oleh undang-undang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya khususnya terkait pelaksanaan penjatuhan penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK dan dasar pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini sebagai dasar pemikiran dalam menjawab pokok permasalahan yaitu tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang jaksa penuntut umum, tinjauan umum tentang surat dakwaan, tinjauan umum tentang tuntutan dan tinjauan umum tentang terdakwa.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Hasil penelitian dari penulisan ini yaitu dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan untuk menentukan tuntutan di Kejaksaan Tinggi Lampung terhadap perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Edaran Jaksa Agung

MELLI PERMATA

Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan yaitu Syarat formil dan materiil dalam penyusunan Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembuktian alat-alat bukti di muka persidangan, BAP perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir. Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Menyusun Surat Tuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama terdakwa Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan peralatan olahraga SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 adalah Surat Dakwaan yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan, Fakta Persidangan, keterangan terdakwa keterangan saksi serta keterangan ahli, Barang bukti, Petunjuk yang berupa kumpulan fakta persidangan dan barang bukti yang dijadikan petunjuk untuk menyusun surat tuntutan dan Hal-hal yang dianggap memperberat dan memperingan dari terdakwa. Pembuatan surat tuntutan dibuat oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan hasil musyawarah atau konsultasi dengan para atasannya, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Aspidus Kejaksaan Tinggi Lanpung, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Standar tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Tindak Pidana Korupsi didasarkan atas ketentuan Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02010 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Setelah melakukan penelitian terkait pertimbangan jaksa penuntut umum dalam menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa perkara tindak pidana korupsi, penulis memberikan saran yaitu perlu adanya pedoman khusus terkait standar dalam penyusunan surat dakwaan untuk Tindak Pidana Korupsi karena tindak pidana korupsi adalah tindak pidana khusus yang tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum sehingga dengan adanya pedoman formil tersebut Surat Dakwaan yang dihasilkan dapat mewujudkan tujuan pemedanaan yang semestinya. Penyusunan surat tuntutan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum harus tepat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan khususnya dalam pengenaan pasal dakwaan untuk terdakwa tidak boleh keliru, sehingga tidak ada pasal yang didakwa menjadi sia-sia atau hanya sebagai pelapis semata. Sehingga tuntutan tersebut benar-benar telah memberikan efek jera yang membuat pelaku tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Kata Kunci : Jaksa Penuntut Umum, Pertimbangan Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

ABSTRACT

BASIS FOR CONSIDERATION OF THE PUBLIC PROSECUTORS IN DETERMINING CRIMINAL ACTIONS AGAINST THE DEFENDANTS OF THE CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION

(Case Study of Decision Number 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK)

**By
MELLI PERMATA**

The Prosecutor's Office is one of the law enforcement agencies that has the competence and authority regulated by law in law enforcement of criminal acts of corruption. Based on the provisions in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor of the Republic of Indonesia, the Public Prosecutor in carrying out his duties and authorities, especially in relation to the implementation of prosecution of defendants of criminal acts of corruption is based on considerations - existing legal considerations. The problem in this study is the basis for consideration by the public prosecutor in compiling the indictment of the accused of criminal acts of corruption in the decision Number: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK and the basis for consideration of the public prosecutor in determining criminal charges against defendants for corruption in decision Number: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN TJK.

The literature review used in this study as the basic premise of the problem, namely an overview of criminal acts, an overview of corruption, an overview of the public prosecutor, an overview of the indictment, an overview of the charges and a general review of the accused.

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. Resource person is prosecutor at Kejaksaan Tinggi Lampung.

The results of this research are the basis for the considerations of the Public Prosecutor in preparing the Indictment to determine the demands at the Lampung High Court for the corruption case on behalf of the defendant Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir as the Commitment Making Officer in the procurement of

MELLI PERMATA

Elementary School sports equipment at the South Lampung Regency Education Office for the 2016 Fiscal Year is the Circular Letter of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-004/JA/11/1993 concerning the Preparation of the Indictment Letter, namely the formal requirements and material in the preparation of the indictment based on the provisions of Article 143 paragraphs (1) and (2) Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, proving evidence before court, BAP on corruption cases on behalf of defendant Yusmardi, ST Binti Yusri Munir. Basis for the Public Prosecutor's Consideration in Compiling the Letter of Indictment for the Corruption Crime case on behalf of the defendant Yusmardi, S.T. Binti Yusri Munir as the Commitment Making Officer in the procurement of Elementary School sports equipment at the South Lampung Regency Education Office for the 2016 Fiscal Year is an indictment that can be proven by the Public Prosecutor before the trial, trial facts, testimony from the defendant, witness testimony and expert testimony, Evidence, instructions in the form of a collection of trial facts and evidence which are used as instructions for compiling a letter of claim and things that are considered aggravating and mitigating the defendant. The prosecution letter was made by the Public Prosecutor's Team with consideration of the results of deliberation or consultation with their superiors, namely the Head of the South Lampung District Attorney's Office, the Lampung High Prosecutor's Aspidus, and the Lampung High Prosecutor's Head. The standard demands of the Public Prosecutor for Corruption Crimes are based on the provisions of Circular Letter Number: SE-003/A/JA/02010 concerning Guidelines for Criminal Prosecutions in Corruption Crimes.

After conducting research related to the considerations of the public prosecutor in determining criminal charges against defendants in cases of corruption, the authors suggest that there is a need for special guidelines related to standards in the preparation of indictments for Corruption Crimes because corruption is a special crime that cannot be equated with general criminal offenses so that with the existence of these formal guidelines, the resulting indictment can achieve the proper sentencing objectives. The preparation of the indictment prepared by the Public Prosecutor must be precise and in accordance with the guidelines that have been determined, especially in the imposition of articles of indictment for the accused, so that no article is charged with being in vain or merely as a coating. So that these demands really have a deterrent effect that makes the perpetrators not repeat their actions in the future.

Keywords: Public Prosecutor, Legal Considerations, Corruption Crimes.